

Analisis Naratif Dampak Tambang Batu Bara Ilegal di Kalimantan Timur

Narrative Analysis of the Impact of Illegal Coal Mining in East Kalimantan

Totok Wahyu Abadi

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Jl. Mojopahit No.666 B, Sidowayah, Celep, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo,
Jawa Timur 61215
Email: totokwahyu@umsida.ac.id

Received : May 20, 2024 ; Revised: July 25, 2024; Accepted: August 20, 2024

Abstrak

Penambangan batu bara ilegal di Kalimantan Timur dilakukan tanpa izin resmi dan sering melibatkan sindikat terorganisir. Hal tersebut menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan yang parah seperti deforestasi, pencemaran air dan lain sebagainya. Selain itu penambangan batu bara ilegal juga berdampak pada adanya konflik sosial dan kerugian perekonomian, seperti hilangnya pendapatan pajak dan biaya rehabilitasi lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis naratif. Dimana analisis interaktif dapat menginterpretasikan makna yang lebih dalam dari narasi untuk mengkaji kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh penambangan batu bara ilegal dan dampak lain-lainnya. Data dikumpulkan dari berbagai sumber media yang mengamati permasalahan ini. Seperti media online dan artikel ilmiah yang terkait topik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambangan batu bara ilegal di Kalimantan Timur mempengaruhi segala aspek. Agar tidak terjadi kerusakan yang berkepanjangan, dibutuhkan adanya kolaborasi antara pemerintah, penegak hukum, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat untuk mendorong pertambangan yang berkelanjutan. Upaya tersebut meliputi penguatan penegakan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif tambang ilegal untuk menjaga sumber daya alam berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Analisis Naratif; Batu Bara; Dampak Penambangan Ilegal; Media Online; Studi Literatur

Abstract

Illegal coal mining in East Kalimantan is carried out without official permits and often involves organized syndicates. This causes severe environmental damage such as deforestation, water pollution and so on. In addition, illegal coal mining also has an impact on social conflict and economic losses, such as loss of tax revenue and environmental rehabilitation costs. This study uses a qualitative method with a narrative analysis approach. Where interactive analysis can interpret the deeper meaning of the narrative to examine the environmental damage caused by illegal coal mining and other impacts. Data

were collected from various media sources that observe this problem. Such as online media and scientific articles related to the topic. The results of the study show that illegal coal mining in East Kalimantan affects all aspects. In order to avoid prolonged damage, collaboration is needed between the government, law enforcement, non-governmental organizations, and the community to encourage sustainable mining. These efforts include strengthening law enforcement, increasing public awareness of the negative impacts of illegal mining to maintain sustainable natural resources for the welfare of the community.

Keywords: Coal.; Impact of Illegal Mining; Literature Study; Narrative Analysis; Online Media

1. Pendahuluan

Penambangan ilegal batu bara telah menjadi isu yang semakin mendesak di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia (Fadli A et al., 2023). Aktivitas ini tidak hanya mengancam keberlanjutan lingkungan, tetapi juga berdampak negatif terhadap masyarakat dan ekonomi lokal. Selain itu, penambangan ilegal batu bara juga menimbulkan dampak yang kompleks dan luas (Kholijah & Santoso, 2022; Prayinto, 2019). Seperti terjadinya kerusakan ekosistem alam, pelanggaran hak asasi manusia serta kerugian ekonomi jangka panjang. Wilayah di Indonesia yang sering kali terjadi penambangan ilegal adalah daerah di Kalimantan Timur.

Seperti yang dilansir dari website BPS Provinsi Kalimantan Timur menyebutkan bahwa di tahun 2023 terjadi 60 kasus penambangan ilegal. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya 14 kasus penambangan ilegal (Kaltim.bps.go.id, 2024). Banyaknya kasus penambangan ilegal menjadikan penurunan perekonomian masyarakat. Padahal melalui pertambangan diharapkan mampu membuka peluang dan upaya kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan lain

sebagainya. Diketahui pula bahwasanya penambangan ilegal yang sering terjadi di Kalimantan Timur adalah penambangan ilegal batu bara.

Dalam penelitiannya Putri menyebutkan bahwa penambangan batu bara ilegal di Kalimantan Timur (Kaltim) dilakukan tanpa izin resmi, sering melibatkan sindikat terorganisir (Putri, 2021). Aktivitas ini merusak lingkungan dengan menebang hutan dan mencemari sumber air, mengancam flora dan fauna. Selain itu, dari perspektif sosial tambang ilegal memicu konflik, merusak lahan pertanian, serta meningkatkan kriminalitas (Fahrurrozi & Said, 2022). Penelitian lainnya menyebutkan bahwa seringkali masyarakat tergoda atas hasil yang didapatkan dari menjadi tenaga kerja penambangan ilegal, namun masyarakat juga harus menyadari bahwa hal tersebut merupakan pekerjaan semantara dan berdampak buruk bagi keluarganya dalam jangka panjang (Qodri & Marpaung, 2024).

Banyak penelitian telah dilakukan untuk mengungkap permasalahan yang terkait dengan penambangan ilegal batu bara mengindikasikan bahwa penanganan masalah ini memerlukan upaya kolaboratif antara pemerintah,

penegak hukum, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat untuk mendorong pertambangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab (Sumanggi, 2023). Upaya lainnya adalah dengan selalu berpendapat, bersuara, mendokumentasikan serta menarasikan fenomena-fenomena akibat dampak yang ditimbulkan dari adanya penambangan ilegal batu bara.

Oleh karenanya penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi penting dalam menyuarakan dan mengingatkan bahwa permasalahan penambangan ilegal batu bara masih sering terjadi, khususnya di daerah Kalimantan Timur. Selain itu studi ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang dampak negatif dari tambang batu bara ilegal, mendorong upaya konservasi dan rehabilitasi lingkungan yang rusak akibat tambang ilegal, sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan strategi untuk mengendalikan penambangan ilegal.

Dalam memberikan sebuah informasi, studi ini menggunakan analisis naratif. Analisis naratif merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk memahami dan menginterpretasikan struktur, konten, dan makna dari narasi. Studi ini memiliki keterbatasan yakni mengungkapkan narasi penambangan ilegal batu bara yang ditulis oleh dua media saja.

2. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan teori analisis naratif. Dimana Analisis naratif dapat membantu memahami permasalahan penambangan ilegal melalui berita dari media online dengan cara yang mendalam dan

komprehensif. Berikut adalah beberapa peran analisis naratif dalam memahami berbagai isu: (1). Menggali Konteks Sosial dan Budaya. Analisis naratif digunakan untuk mengeksplorasi konteks sosial dan budaya di balik berita penambangan ilegal. Dengan menganalisis cerita yang disampaikan dalam berita, dapat mengidentifikasi nilai-nilai, norma, dan kepercayaan masyarakat yang mempengaruhi praktik penambangan ilegal.

(2). Menyelidiki Dampak Lingkungan dan Ekonomi. Melalui analisis naratif, peneliti dapat menelusuri bagaimana cerita-cerita ini menggambarkan kerusakan lingkungan, seperti pencemaran air dan tanah, serta dampak sosial seperti konflik antarwarga atau penurunan kualitas hidup.

(3). Menilai Respons Pemerintah dan Kebijakan. Berita sering kali mencerminkan respons pemerintah terhadap penambangan ilegal dan kebijakan yang diterapkan. Melalui analisis naratif, peneliti dapat mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut dan bagaimana mereka dipersepsi oleh masyarakat. (4). Membangun Kesadaran Publik. Analisis naratif dapat membantu membangun kesadaran publik mengenai isu-isu terkait. Cerita yang kuat dapat mempengaruhi opini publik dan mendorong tindakan kolektif untuk menangani suatu permasalahan.

Analisis naratif memiliki keterkaitan dengan *Teori Critical Discourse Analysis* (CDA) atau Teori Wacana Kritis. Dimana *Teori Critical Discourse Analysis* dapat memahami konteks bagaimana narasi dibentuk, diproduksi, dan diterima dalam

masyarakat. Penekanan teori ini terlihat dari berbagai hal, seperti:

Pertama, CDA menekankan analisis konteks sosial, historis, dan ideologis dalam memahami bagaimana wacana tentang suatu permasalahan. Kedua, CDA memandang bahasa sebagai alat yang penting dalam memproduksi makna dan mempengaruhi perilaku sosial. Ketiga, CDA mengedepankan analisis makna sebagai hasil dari interaksi kompleks antara bahasa, konteks, dan kepentingan, yang relevan untuk memahami bagaimana narasi dibentuk.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis naratif. Analisis naratif merupakan sebuah analisis yang berfokus pada pengalaman individu dan kronologi mereka (Faizin & Haerussaleh, 2020). Dalam desain penelitian naratif, peneliti mendeskripsikan kehidupan individu, mengumpulkan cerita tentang kehidupan individu, dan menuliskan cerita atau riwayat pengalaman individu tertentu.

Penelitian ini memiliki dua kategori sumber data, yakni sumber data yang berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer dalam studi ini didapatkan dengan cara observasi dengan mengamati kajian penelitian terdahulu yang relevan serta dokumentasi yang disajikan oleh portal berita media online. Sedangkan untuk data sekunder penelitian ini merujuk data statistik yang disajikan oleh BPS Provinsi Kalimantan Timur.

Selanjutnya data yang sudah dikumpulkan, dianalisis menggunakan analisis naratif yang meliputi empat aspek. Diantaranya:

Menggali permasalahan melalui konteks sosial, menyelidiki dampak yang ditimbulkan, memperhatikan respons pemerintah serta membangun kesadaran masyarakat.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Menggali Permasalahan Penambangan Ilegal Batu Bara di Kalimantan Timur dalam Konteks Sosial

Aktivitas penambangan batubara ilegal di Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur, telah menjadi masalah yang signifikan selama beberapa dekade terakhir. Eksplorasi tambang batubara ilegal ini bukan saja merusak lingkungan, tetapi juga membawa dampak sosial dan ekonomi yang merugikan masyarakat setempat (Nadya et al., 2020; Syafi'i & Juwita, 2024).

Pola operasi tambang ilegal seringkali memanfaatkan celah di antara dua izin tambang resmi atau dengan berdalih sebagai pemberdayaan warga lokal. Dampak dari aktivitas ini sangat merugikan masyarakat setempat, termasuk kerusakan lingkungan, polusi, dan kerusakan properti warga. Penindakan hukum yang lemah, baik dari aparat kepolisian maupun pengawasan oleh pemerintah, membuat tambang ilegal ini sulit dihentikan.

Berdasarkan artikel yang ditulis detik pada tanggal 18 Mei 2024, Polisi melakukan penggerebekan terhadap tambang batu bara ilegal yang berlokasi di konsesi lahan PT Berau Coal, Berau, Kalimantan Timur (Ramadianti et al., 2024). Mereka berhasil mengamankan tiga unit ekskavator sebagai barang bukti

setelah menerima laporan dari PT Berau Coal mengenai aktivitas penambangan ilegal di lahan perusahaan.

Meskipun saat penggerebekan dilakukan para pekerja tidak berada di lokasi, tindakan ini menjadi langkah awal untuk penyelidikan lebih lanjut terkait kasus tersebut. Manajemen PT Berau Coal juga mengungkapkan bahwa dari tiga lokasi penambangan ilegal yang mereka temukan, hanya satu lokasi yang masih aktif, sementara dua lokasi lainnya telah dihentikan kegiatannya. Mereka telah melaporkan temuan ini kepada polisi untuk diproses secara hukum lebih lanjut.

4.2 Menyelidiki Dampak Lingkungan dan Ekonomi Akibat Penambangan Ilegal Batu Bara di Kalimantan Timur

Artikel dari Kompas.com pada 12 Desember 2022 menggambarkan maraknya kegiatan tambang batu bara ilegal di Kalimantan Timur, khususnya di wilayah Kutai Barat. Sebuah kebun milik nenek bernama Hamidah di Desa Lotaq didatangi oleh dua eksavator yang melakukan penambangan tanpa sepengetahuan pemilik lahan. Kejadian ini memicu konflik sosial. Selain itu permasalahan ini dapat menciptakan ketegangan antarwarga setempat (Amelia et al., 2019).

Dalam artikel disebutkan terdapat upaya dari warga untuk melaporkan ke polisi. Namun penegakan hukum dinilai masih lemah, yang mengakibatkan ketidakpuasan dan langkah swakarsa dari masyarakat.

Selain bersumber dari artikel Kompas.com, dampak kerusakan

yang ditimbulkan oleh adanya penambangan ilegal batu bara di Kalimantan Timur juga ditulis dalam Artikel dari Tempo.co. Artikel tersebut mengulas tentang maraknya aktivitas tambang ilegal di Desa Sumbersari, Kalimantan Timur, sejak tahun 2019 yang telah menyebabkan dampak serius bagi warga setempat. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mencatat ada 168 titik tambang ilegal di empat kabupaten dan kota sejak 2018 (Syafi'i & Juwita, 2024).

Meskipun izin usaha pertambangan (IUP) dari PT Borneo Mitra Sejahtera (BMS) habis pada tahun 2019, aktivitas tambang ilegal terus berlanjut tanpa regulasi yang ketat. Warga seperti Legimin, petani padi dan sayur, mengeluhkan bahwa air di desanya menjadi keruh dan bercampur lumpur karena aktifitas tambang ini, mengancam ketahanan pangan mereka (Amelia et al., 2019). Meskipun Jatam Kaltim telah melaporkan masalah ini ke berbagai pihak termasuk Bareskrim Polri dan Polda Kalimantan Timur, respons yang diterima masih minim hingga saat ini.

4.3 Menilai Respons Pemerintah dan Kebijakan Terkait Penambangan Ilegal Batu Bara di Kalimantan Timur

Pemerintah telah merespon permasalahan terkait penambangan ilegal batu bara di Kalimantan Timur. Seperti langkah koordinasi pemberantasan penambangan ilegal. Koordinasi yang dilakukan pemerintah melibatkan berbagai pihak.

Salah satu langkah yang diambil adalah razia dan penyitaan alat berat yang digunakan dalam aktivitas

penambangan ilegal. Hal ini bertujuan untuk menghentikan operasi tambang ilegal yang merusak lingkungan. Selain itu, pelaku penambangan ilegal dikenakan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku, guna memberikan efek jera.

Koordinasi tersebut melibatkan Instansi penegakan hukum. Antara lain Institusi Kepolisian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Selain upaya penegakan hukum, Pemerintah juga berupaya dalam meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas penambangan ilegal. Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih. Seperti penggunaan teknologi satelit yang dapat memantau aktifitas lokasi-lokasi yang berpotensi mengalami penambangan ilegal.

Pemerintah juga mempunyai Tim gabungan dari berbagai instansi. Dimana tim gabungan tersebut secara rutin melakukan patroli untuk mengawasi dan mencegah aktivitas tambang ilegal. Tim gabungan tersebut merupakan Satuan Tugas Penanganan Penambangan Tanpa Izin (Satgas PETI). Satgas PETI memiliki peran penting dalam mengoordinasikan upaya pengawasan dan penegakan hukum.

4.4. Membangun Kesadaran Publik
Membangun kesadaran publik adalah proses penting yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam isu-isu yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dalam hal ini, masyarakat harus memiliki kepekaan terkait

permasalahan penambangan ilegal di lingkungan mereka.

Masyarakat memiliki peran sangat penting dalam upaya penanggulangan tambang ilegal. Masyarakat diharapkan aktif melaporkan aktivitas tambang ilegal kepada pihak berwenang untuk mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut. Selain itu, partisipasi dalam kegiatan penyelesaian sengketa terkait tambang ilegal dapat membantu menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan (Kholijah & Santoso, 2022).

Meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif tambang ilegal juga penting. Peningkatan kesadaran pada masyarakat dapat berdampak dalam menjaga lingkungan. Selain itu, melalui adanya dukungan masyarakat, dapat memberikan informasi yang akurat kepada aparat penegak hukum. Dimana tujuan akhirnya ialah membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan teratur. Masyarakat juga perlu memahami bahwa penambangan ilegal batu bara di Kalimantan Timur dapat menyebabkan kerugian finansial dan lingkungan.

5. Simpulan

Kesimpulan dari studi ini ialah terdapat aktivitas penambangan batubara ilegal di Kalimantan Timur. Penambangan ilegal menjadi isu serius yang berdampak negatif pada lingkungan, sosial, dan ekonomi. Aktivitas penambangan ilegal tidak hanya merusak lingkungan melalui deforestasi dan pencemaran, tetapi juga menimbulkan konflik sosial dan kerugian ekonomi bagi masyarakat setempat. Penegakan hukum yang

lemah dapat mempersulit penghentian penambangan ilegal.

Pemerintah telah melalukan berbagai upaya untuk menghentikan penambangan ilegal. Salah satunya dengan pembentukan Satgas PETI dan berkolaborasi dengan berbagai institusi. Selain itu, membangun kesadaran publik juga dianggap penting agar masyarakat dapat

berperan aktif dalam melaporkan aktivitas ilegal dan memahami dampak negatifnya. Dengan demikian, upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi terkait diperlukan untuk mengatasi permasalahan penambangan batubara ilegal secara efektif dan berkelanjutan

Daftar Pustaka

- Amelia, N. R., Kartodihardjo, H., & Sundawati, L. (2019). Peran Modal Sosial Masyarakat Penambang Emas Dalam Mempertahankan Tambang Ilegal Di Taman Hutan Raya Seulawesi Tengah. *Jurnal Sylva Lestari*, 7(3), 255. <https://doi.org/https://sylvalestar.i.fp.unila.ac.id/index.php/JHT/article/view/370>
- Fadli A, A. M., Tahir, M., & Gauthama, R. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Penambangan Batuan Ilegal. *Vifada Assumption Journal of Law*, 1(2), 24–29. <https://doi.org/10.70184/fpmtdy75>
- Fahrurrozi, F., & Said, Y. M. (2022). Penerapan Kewenangan POLRI Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pidana Penambangan Batu Bara Illegal. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(3), 9860–9872. <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i3.3280>
- Faizin, A., & Haerussaleh. (2020). Riset Naratif; Sebuah Desain Penelitian. *Jurnal DISASTRI (Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia)*, 2(3), 142-148.
- Kholijah, S., & Santoso, B. (2022). Praktik Tambang Ilegal Ditinjau Dari Maqashid Syariah (Studi Kasus Sungai Kelurahan Tapus). *Jurnal Mabisya*, 3(1), 1–24.
- Nadya, S., Sembiring, R., Rusmiati, E., & Imamulhadi. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pertambangan Batubara Tanpa Izin di Kalimantan Timur Dikaitkan dengan Tujuan Pemidanaan. *Kertha Semaya*, 8(4), 541–570.
- Prayinto, O. S. (2019). Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu 2019. *Electoral Research*, 1(1), 1–18.
- Putri, V. S. E. (2021). Analisis Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batubara Tanpa Izin Usaha Pertambangan Studi Kasus Di Kutai. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(1), 469–480. <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i1.1754>
- Qodri, M. I., & Marpaung, Z. A. (2024). Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penambangan Pasir Ilegal Untuk Bahan Pembangunan Proyek Di Pasaman Barat. *Ranah Research : Journal of Islamic Studies*, 1(1), 1–18.

- Multidisciplinary Research and Development*, 6(5), 2027–2040.
<https://doi.org/10.38035/rrj.v6i5.1110>
- Ramadianti, W. N., Nurliah, S., & ... (2024). Analisis Bingkai Berita Tambang Ilegal Di Kalimantan Timur Oleh Kaltimkece. *Id. Jurnal Media* ..., 2(1). <https://doi.org/https://jurnal.mediakademik.com/index.php/jma/article/view/133>
- Sumanggi, D. (2023). Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Batu Bara Ilegal di Wilayah Samarinda Kalimantan Timur. *HUMANIORUM*, 1(1), 29–35. <https://doi.org/10.37010/hmr.v1i01.1>
- Syafi'i, A., & Juwita, R. (2024). Retorika Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dalam Menghadapi Jurnalis Terkait Berita Lubang Tambang. *Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika Dan Komunikasi*, 5(2), 1309–1319. <https://doi.org/10.35870/jimik.v5i2.676>